



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran.

Memperhatikan sasaran dalam rencana strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018 telah disusun Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2016–2021 dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.

1. VISI

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab



permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah:

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1. **Sumenep Makin Sejahtera** di sini memiliki dua makna. Pertama, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (resources) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industry* lainnya) dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi trend terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang dikelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas : MEA dan AFTA.



Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (meaning) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia Madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman glamourisme dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

2. **Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung stakeholders pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (self-help).
3. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan output pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-akhlaqul karimah. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/spirit dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di



Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Good Governance di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (citizen) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (accountable), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.
6. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif fifty-fifty, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (need assesment) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama



dapat merasakan ‘manis’nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

7. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan skill dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional disini tidaklah berarti mendatangkan ‘orang luar’ (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

2. MISI

Berdasarkan Undang – undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan SUPER MANTAP seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.** Sumber Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan



dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

2. Misi Kedua, **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.** Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.
3. Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan berdaya saing tinggi menjadi modal dasar



dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu memberi dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

4. Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.** Tata Pemerintahan yang baik (good governance) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalisme dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh stakeholder baik dari aparatur pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparatur pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel



yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

5. Misi Kelima, ***Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.*** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Misi Keenam, ***Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.*** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Disamping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar



semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pembangunan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Target Pembangunan
 Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016 - 2021
 Visi: Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis,
 Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional

MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan	1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan serta layanan kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatkan pendidikan sekolah yang ditamatkan dan mutu kecukupan tenaga Pendidikan	IPM Pendidikan Angka Melek Huruf > 15 tahun sd. 55 Tahun Persentase jumlah sekolah terakreditasi



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
				- Persentase SD/MI berakreditasi minimal B - Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B - Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
			2 Meningkatkan minat baca masyarakat utamanya pelajar	Jumlah kunjungan perpustakaan IKM layanan perpustakaan
			3 Meningkatkan status/derajat kesehatan masyarakat bagi masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (%) Persentase individu/jiwa yang memiliki asuransi kesehatan (JKN) Persentase jumlah puskesmas terakreditasi (%)
			4 Meningkatkan akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB aktif Persentase Angka pertumbuhan penduduk
	2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja (%) Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke pengadilan hubungan industrial Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
				Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	
		Persentase Angka Kemiskinan	2. Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS yang ditangani	
				Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	
			3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	
				Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan"	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauan sebagai bentuk upaya menurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah	Indek GINI (GINI Ratio)	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan, dan irigasi	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik Daratan : - Jalan - Jembatan - Irigasi Kepulauan : - Jalan - Jembatan - Irigasi
				2. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas Persentase kecukupan angkutan umum yang layak
				3. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman/perumahan secara memadai	Indeks kota layak huni : Persentase rumah tinggal bersanitasi Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih Persentase rumah layak huni



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
				Persentase Lingkungan pemukiman kumuh Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan) Persentase tersedianya luasan RTH publik	
	2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan 2. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup	Indeks kualitas air sungai Indeks kualitas udara Indeks Tutupan Lahan Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) Rasio elektrifikasi Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	
3	Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi	1. Meningkatkan kegiatan ekonomi, kualitas kelembagaan UMKM Koperasi dan pengembangan wisata daerah serta meningkatkan kinerja penanaman modal/investasi daerah, industri perdagangan	% Pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita	1. Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM 2. Meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata 3. Meningkatnya jumlah investor berskala	Persentase Koperasi sehat Persentase pertumbuhan UMKM Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persentase jumlah kunjungan wisatawan Jumlah nilai investasi penanaman modal



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
			regional dan nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor
			4. Meningkatkan kinerja sektor Industri dan Perdagangan, dan pengembangan/ revitalisasi pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB
				Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB
	2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Meningkatkan nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan)	Jumlah produksi Tanaman pangan (ton): - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi kayu
				Jumlah Produktivitas tanaman pangan (ton/ha): - Padi - Jagung - Kedelai - Ubi kayu
				Persentase jumlah produksi hasil ternak: - Daging (kilo) - Telur (kilo)
				Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)
				kelapa (ton) tembakau (ton) cabe jamu (ton) jambu mete (ton) siwalan (ton)
				Persentase Jumlah luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
			2. Meningkatkan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan	Jumlah hasil perikanan tangkap dan budidaya (ton) : - perikanan tangkap - perikanan budidaya Persentase Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)
			3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase kualitas gizi pangan daerah Persentase daerah rawan gizi
4 Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1 Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan Perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan
			2 Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan
			3 Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik	Jumlah desa sejahtera Persentase desa yang tertib administrasi (%)
	2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah	1 Meningkatkan sistem komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah
			2 Meningkatkan Tertib administrasi kependudukan dan kualitas	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
			layanan kependudukan	memiliki E-KTP
	3 Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel	Nilai Opini BPK	1. Terwujudnya disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dan tersedianya aparatur yang memadai, kompeten, bersih dan akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur
			2 Meningkatkan pelayanan fungsi legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan Jumlah naskah produk hukum Daerah
			3 Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditable	Persentase pertumbuhan PAD (%) Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	
				Persentase Belanja modal terhadap total belanja Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	
5	Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan	1. Meningkatkan kualitas nilai-nilai kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat	% jumlah konflik	1	Meningkatkan toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai penjawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan Jumlah demo besifat sosial
				2	Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif) Angka kriminalitas (%) Persentase penegakan Perda Persentase pelanggaran Perda Jumlah korban bencana Jumlah korban bencana yang tertangani
6	Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat	1. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan	Persentase apresiasi seni dan budaya Sumenep (%)	1.	Menguatnya/ terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep Jumlah kesenian lokal yang dikembangkan



MISI	TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
	URAIAN	INDIKATOR TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA
	olahraga		2. Meningkatkan kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep	Persentase jumlah pemuda yang dibina sehingga berprestasi (%) Persentase jumlah prestasi atlet cabang olahraga berprestasi (%)

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang jelas dan terarah, sehingga visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumenep dapat terwujud. Strategi dan arah kebijakan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak dapat dipisahkan (tidak parsial), sehingga berkesinambungan dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Sumenep menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju



pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2016-2021).

Misi Pertama, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan

1. *Urusan Pendidikan* melalui strategi peningkatan aksesibilitas, integritas dan kualitas pendidikan dengan arah kebijakan : (1) melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas (Wajar Dikdas 9 Tahun); (2) Peningkatan Integritas dan kualitas hasil pendidikan; (3) meningkatkan jumlah sekolah yang terakreditasi.
2. *Urusan Perpustakaan* melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dengan arah kebijakan (1) Optimalisasi fungsi perpustakaan untuk mendukung upaya mencerdaskan masyarakat utamanya kalangan pemuda dan pelajar, serta (2) Optimalisasi layanan perpustakaan daerah maupun perpustakaan keliling.
3. *Urusan Kesehatan* melalui strategi meningkatkan upaya kesehatan masyarakat melalui peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas



- dengan arah kebijakan (1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; (2) Meningkatnya mutu dan cakupan jaminan kesehatan; (3) Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat.
4. *Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana* melalui strategi penguatan akseptor KB dengan arah kebijakan (1) Peningkatan jumlah Akseptor KB; (2) Menurunnya persentase laju pertumbuhan penduduk.
 5. *Urusan Ketenagakerjaan* melalui strategi Pertama, Peningkatan akses serta peluang kesempatan kerja dan berusaha dengan arah kebijakan (1) Memperluas akses informasi dan peluang kerja; (2) Menciptakan iklim berusaha yang kondusif; strategi Kedua yaitu Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan arah kebijakan Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja.
 6. *Urusan Sosial* melalui strategi Penurunan Jumlah PMKS dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu.
 7. *Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* melalui strategi, Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan Pemenuhan Hak Anak dengan arah kebijakan : Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Misi Kedua, Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang didukung Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Lingkungan yang Berkelanjutan.

1. *Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang* melalui strategi pertama, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pekerjaan umum pada wilayah daratan dan kepulauan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pada wilayah daratan dan kepulauan; strategi kedua yaitu meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan arah kebijakan : Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau;



2. *Urusan Perhubungan* melalui strategi meningkatkan ketersediaan kelengkapan fasilitas perhubungan dengan arah kebijakan (1) Pemenuhan fasilitas kelengkapan perhubungan; (2) Meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana pelayanan angkutan umum;
3. *Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* melalui strategi meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman perkotaan dan pedesaan untuk mendukung lingkungan sehat dan nyaman;
4. *Urusan Lingkungan Hidup* melalui strategi pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya lingkungan hidup dengan arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup oleh segenap masyarakat; strategi kedua, pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan akan kebutuhan listrik di daerah daratan dan kepulauan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memberdayakan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.

1. *Urusan Koperasi dan UKM*, melalui strategi meningkatkan akses dan iklim usaha UMKM dan reaktivasi peran koperasi sejalan dengan pengembangan dunia usaha dengan arah kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM;
2. *Urusan Pariwisata*, melalui strategi mengembangkan dan mempromosikan pariwisata unggulan dengan arah kebijakan mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata daerah;
3. *Urusan Penanaman Modal*, melalui strategi mengembangkan iklim yang kondusif bagi investasi dan pelaku usaha ekonomi baru dengan arah kebijakan menciptakan iklim investasi yang kondusif;
4. *Urusan Perindustrian dan Perdagangan*, melalui strategi mengoptimalkan kapasitas industri dan perdagangan yang ada serta



- mengembangkan potensi usaha baru dengan arah kebijakan (1) Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif; (2) Peningkatan jumlah dan kualitas pasar tradisional (pasar tradisional sehat);
5. *Urusan Pertanian*, melalui strategi Mengembangkan ekonomi berbasis pertanian unggulan (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan) dengan arah kebijakan (1) Penguatan Produksi dan produktivitas komoditi sektor pertanian dalam mendorong tumbuh kembangnya usaha berbasis pertanian; (2) Pengembangan dan pelestarian hutan rakyat dan pengelolaan lahan kritis;
 6. *Urusan Kelautan dan Perikanan*, melalui strategi mengembangkan ekonomi berbasis perikanan dan kelautan dengan arah kebijakan penguatan dan menumbuh kembangkan usaha perikanan dan kelautan serta budidaya perikanan darat;
 7. *Urusan Pangan*, melalui strategi mencukupi kebutuhan pangan daerah dengan gizi yang memadai dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan pangan dan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.

Misi Keempat, Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel.

1. *Urusan Perencanaan*, melalui strategi pertama mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu berbasis kepentingan rakyat dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas perencanaan yang bersifat bottom up; strategi kedua yaitu revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan arah kebijakan meningkatkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor; dan strategi ketiga yaitu peningkatan kinerja aparat pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi desa dengan arah kebijakan Penguatan kelembagaan dan administrasi pemerintahan desa;



2. *Urusan Komunikasi dan Informatika*, melalui strategi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dengan arah kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi berbasis pada pengembangan Teknologi Informasi;
3. *Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, melalui strategi meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan arah kebijakan meningkatnya tertib administrasi kependudukan;
4. *Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan*, melalui strategi pertama Pembangunan birokrasi modern sesuai Kebijakan ASN dengan arah kebijakan Membangun dan mengembangkan sistem prosedur dan tata kerja birokrasi sesuai ASN. Strategi kedua yaitu memperluas kesempatan aparatur dalam meningkatkan kualitas dan kapasitasnya yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur. Strategi Ketiga, Pengelolaan sumber-sumber keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien berbasis budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan auditabel dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan pendapatan asli daerah serta Peningkatan kualitas ketatalaksanaan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah; (2) Meningkatkan kompetensi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Misi Kelima, Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder dalam Proses Pembangunan.

1. *Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat*, melalui strategi pertama yaitu terciptanya kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat melalui arah kebijakan : (1) Peningkatan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam menghindari konflik dalam kehidupan masyarakat, (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik dan hukum; strategi kedua adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan suasana kondusif dengan arah kebijakan (1) Meningkatkan partisipasi



masyarakat terhadap keamanan lingkungan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ;

2. *Urusan Penanggulangan Bencana* melalui strategi meningkatkan penanggulangan bencana daerah dengan arah kebijakan meningkatkan penanganan dan pengendalian bencana daerah.

Misi Keenam, Meningkatkan Nilai-nilai Keagamaan dan Budaya serta Nasionalisme yang Didukung Kearifan Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat.

1. *Urusan Kebudayaan,* melalui strategi peningkatan potensi seni dan budaya daerah dengan arah kebijakan pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah.
2. *Urusan Pemuda dan Olahraga,* melalui strategi pemberdayaan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, dan pengembangan olahraga dengan arah kebijakan pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep menetapkan strategi dan arah kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai program, hingga perlu dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan disebut RKPD di Daerah. Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Daerah. Rencana Kinerja Tahun 2018 yang ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya.



C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia
Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah, sebagai berikut :

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN

BUPATI SUMENEP

VISI : SUPER MANTAP

Sumenep Makin Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Mandiri, Agamis,
Nasionalis, Transparan, Adil Dan Profesional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			65,23%
1.1.1.	Meningkatnya Pendidikan Sekolah Yang Ditamatkan Dan Mutu Kecukupan Tenaga Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,26 tahun
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,69 Th
		Angka Melek Huruf > 15 tahun s.d 55 tahun	80,06%
		Persentase jumlah sekolah terakreditasi :	
		Persentase SD/MI yang berakreditasi minimal B	90,25%
		Persentase SMP/MTS yang berakreditasi minimal B	81,30%
		Persentase SMA/SMK/MA yang berakreditasi minimal B	82,30%
1.1.2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Utamanya Pelajar	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	20.500 Pengunjung
		IKM layanan perpustakaan	77,22
1.1.3.	Meningkatnya Status/ Derajat Kesehatan Masyarakat Bagi Masyarakat Sumenep	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,32%
		Persentase Penduduk yang dilindungi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	63%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%
1.1.4.	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi	Rasio KB Aktif	65,07%
		Persentase Angka pertumbuhan penduduk	56%
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka			3,08%
1.1.1.	Meningkatnya Perluasan Lapangan Kerja Dan Kesempatan Berusaha	Persentase partisipasi angkatan kerja	74,11%
		Persentase Penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yang masuk ke pengadilan hubungan industrial	0,26%
		Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	38,86%
		Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenaga Kerjaan	4.085 peserta
Persentase Angka Kemiskinan			17,45%
1.2.2.	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS	100.606 Jiwa
		Persentase PMKS yang ditangani (pemberdayaan PMKS)	4,20%
1.2.3.	Terwujudnya Pemberdayaan Dan Pembangunan Yang Responsif Terhadap Gender	Persentase pengaduan kasus KDRT dan anak	0,022%
		Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	57,38%
Indeks GINI (GINI Ratio)			0,25%
2.1.1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Jalan/Jembatan, Dan Irigasi	Persentase infrastruktur dalam kondisi baik:	
		<u>Daratan:</u>	
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	71,76%
		Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	87,56%
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	6.568 ha
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	74,62%
		<u>Kepulauan:</u>	
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik (%)	51,09%
Persentase jumlah Jembatan dalam kondisi baik (%)	82,86%		



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Daerah irigasi yang dapat diairi dengan irigasi teknis (ha)	353 ha
		Persentase Kecukupan Jaringan Irigasi (%)	60,09%
2.1.2.	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Transportasi	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	0,0764%
		Persentase kecukupan angkutan umum yang layak	83,75%
2.1.3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman/ Perumahan Secara Memadai	Indeks Kota Layak Huni	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	90%
		Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani fasilitas air bersih	50,7%
		Persentase rumah layak huni	23%
		Persentase Lingkungan pemukiman kumuh	5%
		Persentase Cakupan Pelayanan Kebersihan dan Persampahan di 3 Kecamatan (Kec. Kota, Kalianget dan Batuan)	68%
		Persentase tersedianya luasan RTH publik	32%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			72,81%
2.2.1.	Meningkatnya Pengetahuan, Kesadaran Dan Peran Serta Semua Pihak Di Dalam Pengelolaan SDA Dan Lingkungan	Indeks kualitas air sungai	66,67
		Indeks kualitas udara	76,06
		Indeks Tutupan Lahan	74,98
		Jumlah Industri/perusahaan/ badan usaha yang melaksanakan Dokumen Lingkungan (SPPL/UPL-AMDAL)	572
2.2.2.	Meningkatnya Kualitas SDA Dan Lingkungan Hidup	Rasio elektrifikasi	58,47%
		Persentase pemanfaatan sumber daya alam terbarukan	2,05%
Persentase Pertumbuhan ekonomi			6,52%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
PDRB per kapita			27.293.48 (Milyar Rp)
3.1.1.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Koperasi Dan UMKM	Persentase Koperasi sehat (KSP/USP)	2,96%
		Persentase pertumbuhan UMKM	18%
3.1.2.	Meningkatnya Kunjungan Wisata, Yang Didukung Peningkatan Jumlah Sarana Dan Prasarana Wisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	15%
		Persentase jumlah kunjungan wisatawan	9%
3.1.3.	Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Regional Dan Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi penanaman modal:	
		Nilai Investasi PMDN	Rp 435.280.453.984
		Nilai Investasi PMA	Rp 5.020.060.120
		Jumlah investor	5.642 Investor
3.1.3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Dan Pengembangan/ Revitalisasi Pasar	Persentase kontribusi industri terhadap PDRB	6,28%
		Persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB	12,92%
Persentase Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)			82%
3.2.1.	Meningkatnya Nilai Tambah, Hasil Dan Daya Saing Produk Pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan Dan Perkebunan)	Jumlah produksi Tanaman pangan	
		Padi (ton)	227.637,87 ton
		Jagung (ton)	432.013,58 ton



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kedelai (ton)	7.553,42 ton
		Ubi Kayu (ton)	105.670,40 ton
		Produktivitas tanaman pangan	
		Padi (ton/ha)	6,81 ton/ha
		Jagung (ton/ha)	2,98 ton/ha
		Kedelai (ton/ha)	1,63 ton/ha
		Ubi Kayu (ton/ha)	15,01 ton/ha
		Peningkatan Jumlah Populasi dan Produksi hasil Ternak :	
		Populasi Peternakan	
		sapi potong	363.824 ekor
		kerbau	5.119 ekor
		kuda	2.183 ekor
		kambing	150.924 ekor
		domba	38.993 ekor
		ayam buras	782.582 ekor
		ayam petelur	324.522 ekor
		ayam pedaging	116.581 ekor
		itik	56.448 ekor
		mentok	12.382 ekor
		Peningkatan Produksi Peternakan	
		Daging	4.474.256 kg
		Telur	2.761.838 kg
		Jumlah produksi hasil perkebunan (ton)	



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Peningkatan Produksi Perkebunan :	
		kelapa	42.642,76 ton
		tembakau	9.244,58 ton
		cabe jamu	9.865,92 ton
		jambu mete	4.974,94 ton
		siwalan	776,27 ton
3.2.2.	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Laut Yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan :	
		Jumlah hasil perikanan tangkap (ton)	48.100 ton
		Jumlah hasil perikanan budidaya (ton)	647.294 ton
		Jumlah Pertumbuhan Tingkat konsumsi ikan	41,09 kg/kap/th
3.2.3.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase kualitas gizi pangan daerah	80%
		Persentase daerah rawan gizi	12%
Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah			45%
4.1.1.	Meningkatnya Perencanaan Daerah Berbasis Kepentingan Masyarakat	Persentase usulan desa dan kecamatan yang terakomodir di dokumen perencanaan	26%
4.1.2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Program Dan Kegiatan Pembangunan	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan	65%
4.1.3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Jumlah desa sejahtera	81 desa



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase desa yang tertib administrasi	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM / SKM) terhadap Layanan Publik Daerah			80,25
4.2.1.	Meningkatnya Sistem Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jumlah Pengunjung terhadap website instansi pemerintah daerah	3.287 orang
4.2.2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Layanan Kependudukan	Persentase penerbitan KTP penduduk usia 17 tahun ke atas/ telah menikah memiliki E-KTP	91%
Nilai Opini BPK			WTP
4.3.1.	Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi	85%
		Persentase jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Sumenep	91%
		Persentase jumlah pelanggaran disiplin ASN	0,20%
		Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur	peringkat 31
		Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur	Nilai 70,00
4.3.2.	Meningkatnya Pelayanan Fungsi Legislatif	Jumlah Risalah rapat/sidang Paripurna DPRD yang dihasilkan	181 kali
		Jumlah naskah produk hukum Daerah	23 naskah
4.3.3.	Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan	Persentase pertumbuhan PAD	15%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Auditabel		
		Persentase luas aset tanah Pemda yang bersertifikat	34,87%
		Persentase Belanja modal terhadap total belanja	19,12%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	80%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	87%
Persentase Jumlah Konflik			1%
5.1.1.	Meningkatnya Toleransi Dan Komunikasi Antar Umat Beragama Sebagai Pengejawantahan Dari Kesadaran Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Bernegara	Persentase penanganan kasus konflik sosial dan keagamaan	93%
		Jumlah demo besifat sosial	100%
5.1.2.	Meningkatnya Stabilitas Sosial Dan Perlindungan Masyarakat (Terwujudnya Kondisi Masyarakat Yang Kondusif)	Angka Kriminalitas	14,28%
		Persentase Penegakan Perda	94,56%
		Persentase Pelanggaran K3	5,44%
		Persentase penanganan daerah rawan bencana	78,75%
		Jumlah Korban Bencana	50 orang
		Jumlah korban Bencana yang tertangani	50 orang
Persentase Apresiasi Seni Dan Budaya Sumenep			10%
6.1.1.	Menguatnya/ Terpeliharanya Seni Dan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Kabupaten Sumenep	Persentase kesenian lokal yang dikembangkan	10%



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1.2.	Meningkatnya Kualitas Peranan Pemuda Dan Prestasi Olahraga Di Kabupaten Sumenep	Persentase pemuda yang dibina sehingga berprestasi	10%
		Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	20%